

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENINGKATAN POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN SINJAI

Jusniaty Jusniaty¹, Baharuddin Baharuddin², Nurmiati Nurmiati³ & Muh. Alfi Syahrin⁴

¹ **Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: jusniaty@gmail.com

² **Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: baharuddin110985@gmail.com

³ **Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: nurmiati1894@gmail.com

⁴ **Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: m.alfi.syahrin32@gmail.com

Abstrak

Kebijakan yang ada memberikan arah yang jelas bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama dalam sektor pariwisata. Implementasi kebijakan adalah langkah terakhir dari proses kebijakan. sebenarnya, proses implementasi aturan menjadi penentu terakhir yang paling signifikan atas pembuatan secara keseluruhan kebijakan. Tujuan implementasi adalah membangun jaringan untuk membuka peluang dimana tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu agenda kegiatan, seperti halnya sektor pariwisata. Untuk itu, Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Kebijakan; Pariwisata; Berkelanjutan; Potensi Ekonomi

PENDAHULUAN

Kabupaten Sinjai, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan warisan sejarah yang beragam, Sinjai memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Namun, untuk memanfaatkan potensi pariwisata dengan baik, diperlukan kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan pariwisata di Kabupaten Sinjai dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Pariwisata merupakan sektor strategis dan media untuk mengintegrasikan program dan kegiatan antar sektor pembangunan. Dengan demikian pariwisata merupakan leading pembangunan yang dapat menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata

Jusniaty Jusniaty¹, Baharuddin Baharuddin², Nurmiati Nurmiati³ & Muh. Alfic Syahrin⁴

seperti tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 s.d 2025 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011[1] antara lain meningkatkan kualitas pariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di tempat destinasi, penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing, penguatan kemitraan usaha, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab lingkungan, menciptakan komunikasi yang kredibel dalam penyampaian produk wisata, pengembangan organisasi dan SDM.

Dari kebijakan tersebut kemudian Kabupaten Sinjai menyusun Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara pariwisata yang menjadikan sektor pariwisata sebagai alternatif dalam mendorong perekonomian daerah. Dari data yang dirilis melalui media online www.kabarsinjai.com pada tanggal 15 April 2022 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,150 Miliar. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari target tahun sebelumnya yakni berkisar pada angka Rp. 520 Juta. Kenaikan yang direncanakan tersebut melihat minat wisatawan yang berkunjung semakin banyak pasca pandemi kian memberikan ruang untuk melakukan aktivitas diruangan terbuka.

Kebijakan yang lahir perlu diimplementasikan agar rencana tindakan yang dirancang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan yang ada memberikan arah yang jelas bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama dalam sektor pariwisata. Implementasi kebijakan adalah langkah terakhir dari proses kebijakan. sebenarnya, proses implementasi aturan menjadi penentu terakhir yang paling signifikan atas pembuatan secara keseluruhan kebijakan. Dengan kata lain, sebaik apa pun formulasi dan rumusan aturan yang dibuat, menjadi tidak signifikan manakala pembuatan itu tidak melanjutkan proses implementasi. Dengan demikian, sama sekali tidak mengatakan rumusan dan formulasi kebijakan buruk atau baik, Jika itu dilakukan, maka akan memiliki manfaat [2].

Dari kebijakan tersebut diharapkan pekerjaan rumah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat teratasi. Pekerjaan rumah bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Sinjai A. Seto Gadista Asapa, SH., LLM yang dimuat dalam media online [3] . Dalam pertemuannya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa waktu yang lalu Bupati Sinjai mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam sektor pariwisata saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan desa wisata, kurangnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kreatif di desa. Kekurangan tersebut tentu saja berdampak pada banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang tidak mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kendala tersebut perlu penanganan atau alternatif solusi sehingga melahirkan kebijakan yang akan menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda dunia dalam proses pembangunan disetiap negara. Para stakeholder diharuskan melibatkan prinsip pembangunan berkelanjutan didalam setiap pengambilan kebijakan serta rencana pembangunan dalam suatu wilayah. [4] Pedoman Destinasi Berkelanjutan yang disusun dalam Permen No.14 Tahun 2016 memberikan acuan yang komprehensif mengenai tata kelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Melalui pedoman tersebut, setiap pengelola mampu melaksanakan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Pengelolaan destinasi berkelanjutan mencakup empat aspek yakni, perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. Keempat kriteria tersebut yang menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan, dan keseimbangan yang sesuai harus dibentuk untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. [5]

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan desa wisata merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan desa wisata dapat menyebabkan pengembangan pariwisata menjadi tidak berkelanjutan dan bahkan dapat merusak lingkungan dan kebudayaan setempat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kreatif di desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi di suatu daerah. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat aksesibilitas dan daya tarik destinasi wisata, sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu di daerah tersebut. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga dapat menghambat pengembangan usaha ekonomi kreatif di desa, sehingga masyarakat setempat sulit untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.

Permasalahan tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa proses implementasi kebijakan yang lahir dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dengan baik dan pendanaan telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan mengkolaborasikan antara tujuan kebijakan dan penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn [6] bahwa tujuan implementasi adalah membangun jaringan yang membuka peluang dimana tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu agenda kegiatan, seperti halnya sector pariwisata. Untuk itu, Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi [7]. Berdasarkan perumusan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerepan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai?

Jusniaty Jusniaty¹, Baharuddin Baharuddin², Nurmiati Nurmiati³ & Muh. Alfic Syahrin⁴

METODOLOGI

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan/strategi penelitian, yang berarti bahwa mengambil pendekatan studi kasus di destinasi pariwisata tertentu di Kabupaten Sinjai. Ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam konteks nyata. Dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di destinasi tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Hutan Mangrove Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Petugas Jaga di Destinasi Wisata, Pengunjung Destinasi Wisata, Pedagang di Sekitar Destinasi Wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan yang lahir dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dengan baik dan pendanaan telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan mengkolaborasikan antara tujuan kebijakan dan penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tujuan implementasi adalah membangun jaringan yang membuka peluang dimana tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas organisasi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu agenda kegiatan, seperti halnya sector pariwisata. Untuk itu, Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penerepan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai akan diuraikan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut menggunakan indikator Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi

Setiap regulasi yang akan dirancang untuk pariwisata berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senantiasa melakukan koordinasi dengan Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar-instansi terkait melalui dukungan komunikasi dan

koordinasi. Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

2. Sumber Daya

Keterbatasan akan sumber daya menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dan dicari solusinya secara bersama, terlebih dalam implementasi sebuah kebijakan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai harus melakukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan alokasi anggaran pada sektor pariwisata, pengembangan infrastruktur pendukung, dan peningkatan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat guna memahami kebijakan yang akan dijalankan.

Letak geografis Kabupaten Sinjai yang berada diantara wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Gowa sehingga memiliki peluang besar untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada. Kabupaten Sinjai termasuk iklim subtropis, yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April – Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April.

Data tentang tingkat pendidikan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan. Terdapat kekurangan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai pemerintahan dan masyarakat setempat masih sangat diperlukan, agar tidak menjadi penghambat dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan.

Berikut data pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah
1	S2	Manajemen Kependudukan dan SDM	1
		Administrasi Pembangunan	1
		Ilmu Sosial	1
		Manajemen dan Keuangan Daerah	1
		Manajemen Sumber Daya Aparatur	1
2	S1	Tafsir Hadis	1

Jusniaty Jusniaty¹, Baharuddin Baharuddin², Nurmiati Nurmiati³ & Muh. Alfic Syahrin⁴

No.	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah
		Teknik Sipil	1
		Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
		Ekonomi Akutansi	2
		Ilmu Ekonomi	1
		Manajemen Pariwisata	2
		Manajemen Ekonomi	1
		Administrasi Negara/Publik	2
		Ilmu Pemerintahan	1
3	DIV	Manajemen Pariwisata	1
4	DIII	Pariwisata	1
5	SMA	SMA	1
Total			22

3. Disposisi

Untuk implemementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dalam hal disposisi para implementornya sudah terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan terlaksananya Tupoksi yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Selain itu, diadakan koordonasi dengan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai seperti Pokdarwis, Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Koordinasi dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2033. Untuk Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dilihat di <https://disparbud.sinjaikab.go.id/web/trashed/>.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang kita kenal selama ini jika dalam bahasa inggris disebut Bureaucracy yang terdiri dari dua kata yaitu “*bureau*” yang artinya meja dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan. Jika kekuasaan tersebut diterjemahkan berarti merujuk pada pada orang-orang yang ada dibelakang meja. Namun jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “birokrasi” memiliki arti tentang bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan tersebut melibatkab pegawai pemerintah

yang berpegang pada kejelasan tentang hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau tata urutan pekerjaan yang biasanya serba lamban serta berdasar pada tata aturan yang ruwet.

Untuk itu, jika berbicara tentang implementasi kebijakan maka kita akan teringat sesuatu yang bersifat kompleks dan berliku-liku. Dimana implementasi kebijakan ini menuntut kerjasama oleh banyak pihak. Oleh karena itu, struktur birokrasi harus selalu kondusif dengan adanya implementasi suatu kebijakan, jika tidak demikian maka hal ini akan menyebabkan kurang efektifnya implemmtasi dan tentu saja akan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sinjai berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2033. Dalam dokumen RIP tersebut tertera tujuan pengembangan pariwisata yakni; (a) memberikan arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten; (b) memberikan pedoman perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan Pariwisata Kabupaten; dan (c) menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

PENUTUP

Kebijakan Berkelanjutan sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, hal ini tentu saja di dukung dengan kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sinjai yakni Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019, tentu saja tujuan kebijakan tersebut untuk mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan, promosi budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, jika dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Edward III tentang Implementasi kebijakan maka ditemukan hasil bahwa: (a) Komunikasi: Koordinasi antar instansi terkait masih memerlukan perbaikan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. (b) Sumber Daya: Keterbatasan SDM dan infrastruktur menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan. (c) Disposisi: Pemahaman dan dukungan implementor dalam menerapkan kebijakan sudah baik, namun perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lebih erat dengan pemangku kepentingan. (d) Struktur Birokrasi: Kompleksitas birokrasi terkadang menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Selain itu, dibutuhkan pula penguatan diberbagai bidang misalnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM pariwisata, peningkatan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan sarana untuk ekonomi kreatif di desa wisata. Dengan demikian Implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sinjai memerlukan penguatan di aspek komunikasi, SDM, dan birokrasi untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata. Sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025,” LN. 2011 No. 125, TLN No. 5262, LL SETNEG 50 HLM, vol. 1, no. 2009, pp. 1–25, 2011, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011>
- [2] E. Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies,” J. at-Tadbir, vol. 30, pp. 129–153, 2020.
- [3] “Langkah Strategi Gapai PAD Sektor Pariwisata Sinjai - Pembela News.”
- [4] G. Rimadevi, L. I. Mindarti, and I. Hanafi, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan,” J. Ilm. Adm. Publik, vol. 8, no. 2, pp. 184–192, 2022.
- [5] B. Pelaksana and O. Danau, “Kementerian pariwisata,” no. 125, p. 2002070, 2019.
- [6] H. Akib, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar,” J. Adm. Publik, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2010.
- [7] M. M. Jupir, “Journal of Indonesian Tourism and Development Studies IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT),” J.Ind. Tour. Dev. Std, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2013, [Online]. Available: <http://jitode.ub.ac.id>.
- [8] Arifin, Z. . (2020). PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 11(2), 139–150. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v11i2.330>
- [9] Arifin, Z. . (2018). INETERAKSI WISATAWAN DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 9(1), 49–64. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v9i1.349>
- [10] Amiruddin, A., & Arifin, Z. . (2020). PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA EKOWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDY KASUS DESA TONGKE – TONGKE). Jurnal Ilmiah Administrasita’, 11(1), 16–24. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v11i1.66>